

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Disusun dan diajukan oleh

HASMITA SARI B

E051181302



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh

HASMITA SARI B

E051 181 032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

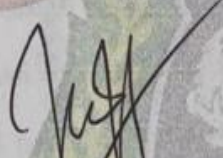
Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si

NIP. 19630912 198702 2001


Rahmatullah Effar, S.IP, M.Si

NIP. 197770513 200312 1002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Dipersiapkan dan di susun oleh

HASMITA SARI B

E051 181 032

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi pada
Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar,

2022

Menyetujui,




PANITIA UJIAN

Ketua : Prof Dr.Djuanda Nawawi,M.Si

Sekretaris :Rahmatullah Jafar.S.IP,M.Si

Anggota : Dr. Indar Ariffin .M.Si

Anggota : Ashar Prawitno S.IP.M.Si

()
()
()
()

Pembimbing Utama :Prof Dr.Djuanda Nawawi,M.Si (

Pembimbing Pendamping : Rahmatullah Jafar.S.IP,M.Si (

()
()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasmita Sari B

Nim : E051 181 032


Judul Skripsi :” PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI
KABUPATEN LUWU TIMUR”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,

2022




Hasmita Sari B

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Luwu Timur”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini, hingga menjelang penyelesaiannya. Dengan berbagai dinamika yang dihadapi, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dukungan serta doa dari berbagai pihak juga menjadi penyemangat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga pada penyelesaian masa studi akhir di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, ayahanda Benni dengan ibunda Ratna yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik penulis hingga penulis dapat sampai pada tahap kehidupan sekarang ini. Terima kasih atas dukungan moril dan materilnya kepada penulis atas segala pengajaran dan nasehat yang tak lelah terus disampaikan.

Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT. memberikan kesehatan dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof.Dr. Jamaluddin Jompa,M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya, yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi, sekaligus pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof.Dr.H.Djuanda Nawawi,M.Si dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan bapak Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang

terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya Dinas pertanian dengan Bapak Amrullah S.Pd.MM selaku kepala dinas pertanian kabupaten luwu timur

9. Kepada orang-orang yang selalu ada untuk penulis, menjadi support system dan teman berbagi kisah. Nurhidayati. Semoga kebersamaan ini tetap terjalin dan akan selalu seperti ini.
10. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan “Eleftheria” 2018 : nurfasila, gifani, nurhidayati, wihdah, ida, ainun, mutia, amel, kiki, nuna, nunu, wahyudi, yudi, sofyan, nini, prisil, cindy, Erika, adam, adinda, Adrian, akbar, aiman, aldi, malarangeng. ayuni, carlos, cepi, devi. dini, eka, enni, faiza, fatur, femi, gispa, ica, ilham, imam, kiki, made, mely, mita afrillah, ocid, rais, raya, rical, riska, ryas, sekar, srijayanti, sulhan, syifa, tuti.
11. Terimakasih untuk teman-teman KKN Luwu timur 1 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang baik selama masa kuliah kerja nyata : kirgizt, ayuni, reski, defa, ghita, astuti

Makassar,

2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	10
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Peran Pemerintah.....	8
2.1.1. Pengerian Peran	8
2.1.2. Pengertian Strategi.....	10
2.2. Pemerintah daerah	12
2.3. Pemberdayaan dan perlindungan petani.....	17
2.4. Kerangka konseptual	19
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
3.1. Lokasi Penelitian.....	21
3.2. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian	21
3.3. Informan Penelitian	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	22

3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6. Fokus Penelitian	25
BAB IV	26
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1. Gambaran umum kabupaten luwu timur	26
4.1.1 Sejarah kabupaten luwu timur	26
4.1.2. keadaan geografis dan Administrasi Wilayah kabupaten luwu timur.....	33
4.1.3. keadaan topografis kabupaten luwu timur	35
4.1.4. Demografi Kabupaten Luwu Timur	36
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Mangkutana	38
4.2.1 Sejaras kecamatan mangkutana	38
4.2.2 Keadaan Geografis.....	40
4.2.3 Penduduk	41
4.3 Gambaran Umum Kecamatan Kalaena.....	42
4.3.1 Sejarah kecamatan Kalaena.....	42
4.3.2. Letak Geografis.....	43
4.3.3. Kondisi Demografis	44
4.3.4. Pertanian dan Perkebunan	46
4.4. Gambaran umum dinas pertanian kabupaten luwu timur	47
4.4.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian.....	47
4.4.2 visi dan misi dinas pertanian kabupaten luwu timur.....	49
4.4.3. Strategi dan arah kebijakan dinas pertanian kabupaten luwu timur.....	52
4.4.4. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur..	62
4.5. Peran dan strategi pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dikabupaten luwu timur.....	64
4.5.1. Strategi Perlindungan	64
4.5.2. Strategi Pemberdayaan	81
BAB V	104
KESIMPULAN DAN SARAN.....	104

5.1. Kesimpulan.....	104
5.2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN – LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur.....	46
Tabel 2. Topografi Wilayah Kabupaten Luwu Timur.....	47
Tabel 3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Luwu Timur.....	48
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio.....	50
Tabel 6. Realisasi Penyaluran Tanam Bantuan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2019.....	79
Tabel 7. Realisasi Penyaluran Tanam Bantuan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2020.....	80
Tabel 8. Realisasi Penyaluran Tanam Bantuan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2021.....	81
Tabel 9. Realisasi Penyaluran Tanam Bantuan Padi Tahun Anggaran 2020.....	81
Tabel 10. Realisasi Penyaluran Tanam Bantuan Padi Tahun Anggaran 2021.....	82
Tabel 11. Alat Pengelolaan Lahan Pertanian Traktor Roda Empat.....	85
Tabel 12. Alat Pengolahan Lahan Pertanian Traktor Roda Dua.....	86
Tabel 13. Alat Semprot Hama Tanaman.....	86
Tabel 14. Alat Pengabut.....	87
Tabel 15. Alat Emposan Tikus.....	87
Tabel 16. Penyaluran Jenis Pupuk Bersubsidi.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep.....	32
Gambar 2. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur.....	45
Gambar 3. Peta Administrasi Wilayah Mangkutana.....	52
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Luwu Timur.....	75

ABSTRAK

HASMITA SARI.B Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul: **Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Luwu Timur** (Dibimbing oleh Prof.Djuanda Nawawi,M.Si dan Rahmatullah,S.IP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Luwu Timur dan program pelaksanaan pemberdayaan serta factor – factor apa saja yang mendorong dan menghambat pemberdayaan petani Kabupaten Luwu Timur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif diskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang Peran Pemerintahan Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan pettni di Kabupaten Luwu Timur masih kurang optimal karna kurangnya kerja sama dan partisipasi antara Pemerintah dan Masyarakat Petani.

Kata Kunci : Strategi, Peran, Perlindungan dan Pemberdayaan

ABSTRACT

HASMITA SARI.B Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepared Thesis with the Title: **The Role of Local Government in the Protection and Empowerment of Farmers in East Luwu Regency** (Supervised by Prof. Djuanda Nawawi, M.Si and Rahmatullah, S .IP)

This study aims to determine and analyze the role of the local government in the protection and empowerment of farmers in East Luwu Regency and the empowerment implementation program as well as what factors encourage and hinder the empowerment of farmers in East Luwu Regency.

The type of research used is descriptive qualitative research, which is intended to explore and clarify a phenomenon of social reality, by describing data and facts relating to the problem and unit being studied. This study aims to provide a clear picture of the role of local government in the protection and empowerment of farmers in East Luwu Regency.

The results showed that the Regional Government's Role Strategy in the protection and empowerment of domestic workers in East Luwu Regency was still less than optimal due to the lack of cooperation and participation between the Government and the Farming Community.

Keywords: Strategy, Role, Protection and Empowerment

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah masyarakat agraris maka dalam hal ini yang berpotensi besar dalam pembangunan nasional adalah bidang pertanian dan sebagian besar dalam pembangunan nasional adalah bidang pertanian,serta sebagian besar pendapatan mereka berasal dari produk tanaman,pangan perkebunan,peternakan,perikanan dan kehutanan.

Indonesia merupakan negara agraris sebab sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Hal tersebut juga didukung oleh kondisi fisik geografis berupa iklim yang tropis, keanekaragaman hayati dan kondisi lahan menjadi potensi alam yang sangat menjanjikan dalam bidang pertanian. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting untuk peningkatan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan. Bagi negara agraris, peran pertanian akan lebih dominan dalam sistem perekonomian nasional.

Potensi alam Indonesia untuk mendukung sektor pertanian tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal tersebut bergantung dari bagaimana potensi dan kekayaan alam digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin yang tentu saja tidak dengan menimbulkan kerusakan-kerusakan bagi alam. Dunia pertanian memang tidak dapat lepas dari bagaimana alam

mengaturnya. Meskipun demikian, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membuat pertanian tidak lagi hanya bergantung pada alam.

Upaya pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi pertanian agar terus meningkat yaitu dengan melaksanakan fungsinya melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana perlindungan dan pemberdayaan petani dimaksudkan untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasana produksi, serta merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani. Pada undang-undang tersebut, usaha pemerintah dalam melindungi petani melalui upaya dalam menyediakan sarana produksi. Kemudian dalam hal pemberdayaan, pemerintah menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani yang kegiatannya memfasilitasi petani untuk memperoleh sarana produksi pertanian yang disediakan oleh pemerintah dan juga meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani.

Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi sumberdaya pertanian yang cukup besar. Dimana sumberdaya lahan sawah dan lahan kering cukup luas, dimanfaatkan untuk usahatani padi, palawija, hortikultura(buah-bauhan), perkebunan dan usaha tani. Dengan kondisi iklim yang favorabel, tipe iklim A, curah hujan tinggi (basah,>1500mm/th), usahatani dengan bulan kering yang tidak jelas sangat menunjang

keberhasilan usahatani di daerah ini. Kondisi yang demikian memberi peluang besar bagi berbagai komoditi pertanian tumbuh dengan baik dan memiliki prospektif untuk dikembangkan, komoditas pertanian yang banyak diusahakan dan memberi kontribusi besar di Kabupaten Luwu Timur diantaranya adalah padi, dan jagung. Total produksi dan produktivitas padi dan jagung di daerah ini adalah masing-masing 135.845 ton dan 5,16ton/ha, serta 13.783 ton dan 5,36 ton/ha. Sementara itu luas area lahan sawah di Kabupaten Luwu Timur seluas 20.017 Ha, terdapat 9.267 Ha yang menggunakan sistem pengairan/irigasi teknis, 7.587 Ha beririgasi setengah teknis, 210 Ha beririgasi sederhana, 1.616 Ha merupakan sawah tadah hujan, pasang surut 50 Ha dan 1.285 Ha beririgasi Desa/non PL. Lahan kering di Kabupaten Luwu Timur diantaranya digunakan untuk rumah/pekarangan, tegal/kebun, ladang/huma, tanah gembala/padang rumput, rawa-rawa yang tidak ditanami, tambak kolam/tebat, lahan sementara yang tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lainnya.,persentase penggunaan lahan kering di Kabupaten Luwu Timur yang paling banyak adalah untuk hutan Negara, yakni sebesar 36,97 persen.

Perlindungan dan pemberdayaan petani melalui keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang

dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 03 tahun 2008 tentang tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pertanian dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta tugas lainnya yang diberikan oleh bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut dinas pertanian kabupaten luwu timur mempunyai fungsi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis dibidang pertanian, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Namun demikian bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah tersalurkan di masyarakat masih mengalami permasalahan yang begitu kompleks di lapangan. hal ini dapat dilihat bahwa harapan dan kenyataan jauh berbanding terbalik apa yang diharapkan petani dengan bantuan yang diberikan pemerintah daerah, dari hasil pra peneliti menunjukkan ada permasalahan yang timbul terkait pertanian di luwu timur yaitu belum mencapainya hasil yang maksimal, karena berdasarkan data yang diperoleh dari hasil produksi pertanian petani masih di bawah rata-rata, dan hal ini dipengaruhi kurangnya tingkat SDM petani sehingga belum mampu mengelolah dengan baik lahan dan hasil pertaniannya, dunia pasar yang memberikan penawaran yang rendah sehingga mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kegiatan pertanian semakin menurun dan belum mantapnya sistem dan pelayanan penyuluh pertanian terhadap kegiatan usaha tani.

Pemerintah daerah di luwu timur melalui kepala dinas pertanian merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertanian bagi masyarakat tani, karena merupakan keharusan kepala dinas pertanian untuk meningkatkan kualitas pertanian di luwu timur dengan melaksanakan dengan baik kewenangan pemerintah dalam penanganan pertanian yang meliputi pemberdayaan dan perlindungan petani. pemberdayaan dan perlindungan petani di luwu timur tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pasal 7 ayat (2) strategi perlindungan petani dilakukan melalui a) prasarana dan sarana produksi petani dan kemudian dilanjutkan dalam ayat (3) strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui a) Pendidikan dan pelatihan b) penyuluhan dan pendampingan c) pengembangan sistem dan sarana hasil pertanian , sehingga berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut yang di beri judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PETANI DI LUWU TIMUR”** untuk kemudian dilakukan kajian untuk sebuah penelitian dalam skripsi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan strategi pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di kabupaten luwu timur ?

2. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat petani di kabupaten luwu timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas,maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran dan strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan petani di kabupaten luwu timur
2. untuk mengetahui dan menggambarkan factor-faktor penghambat dan pendorong perlindungan dan pemberdayaan petani di kabupaten luwu timur

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Secara akademis,penelitian ini berguna untuk menambah bahan kajian keilmuan terkhusus untuk program studi ilmu pemerintahan dalam mengkaji proses pelaksanaan salah satu fungsi pemerintahan yaitu fungsi perlindungan dan fungsi pemberdayaan masyarakat petani

2. Manfaat metodologis

Secara metodologis,penelitian ini berguna memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan focus penelitian ini.

3. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya petani di kabupaten luwu timur dan menjadi referensi untuk pemerintah menjalankan fungsinya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Pemerintah

2.1.1. Pengerian Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya

menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

2.1.2. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarnya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Chandler (1962), Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang,

program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Quinn (1999:10) mengartikan Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Menurut Stephanie K. Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant (1999:21) strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu:

- 1.) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu

bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.

2.) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi Salah satu peranan penting sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk strategi sebagai memberikan kesamaan arah bagi perusahaan

3.) Strategi sebagai target, Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang.

2.2. pemerintah daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kansil, 1984:21).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah :Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban

memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Hal lain tentang C.F Strong adalah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang menjalankan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Secara garis besar, pemerintah lebih besar dari pada institusi atau organisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Indonesia terbagi atas daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus keluarganya sendiri. Kewenangan mengawasi dan mengurus keluarga meliputi tiga isi pokok: Pertama, menyelesaikan penugasan dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, memberi kepercayaan dan kekuatan untuk berpikir, berinisiatif untuk bertindak dan menentukan cara untuk menyelesaikan tugas; ketiga, berpikir keras, berinisiatif dan mengambil keputusan, melibatkan masyarakat secara langsung, dan berpartisipasi bersama DPRD.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh- kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrem, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan

keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli :

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan di maksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

Kemudian peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 3 tahun 2010 tentang pembentuka organisasi dan tata kerja badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan menjelaskan dalam lampiran tersebut dimana badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitas terhadap penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang di pimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dan badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan mempunyai tugas membantu bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis badan

dalam melaksanakan urusan dibidang penyuluhan pertanian,perikanan,dan kehutanan.pengelolaan tersebut meliputi memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha,mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi,teknologi,dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya,membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta meresopon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha,melembagakan nilia-nilai budaya pembangunan pertanian,perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

2.3. pemberdayaan dan perlindungan petani

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan yaitu berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu, dan mendapat

awalan “ber-” dan menjadi kata “berdaya” yang artinya memiliki kemampuan dalam melakukan sesuatu. Pemberdayaan berarti membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Pemberdayaan petani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani

Menurut kamus besar bahasa Indonesia petani adalah orang yang mata pencahariannya bercocok tanam (mengusahakan tanah). sedangkan pertanian adalah pengusahaan tanah atau segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan), atau memperlindungi. Pemberdayaan adalah proses atau cara, perbuatan memberdayakan

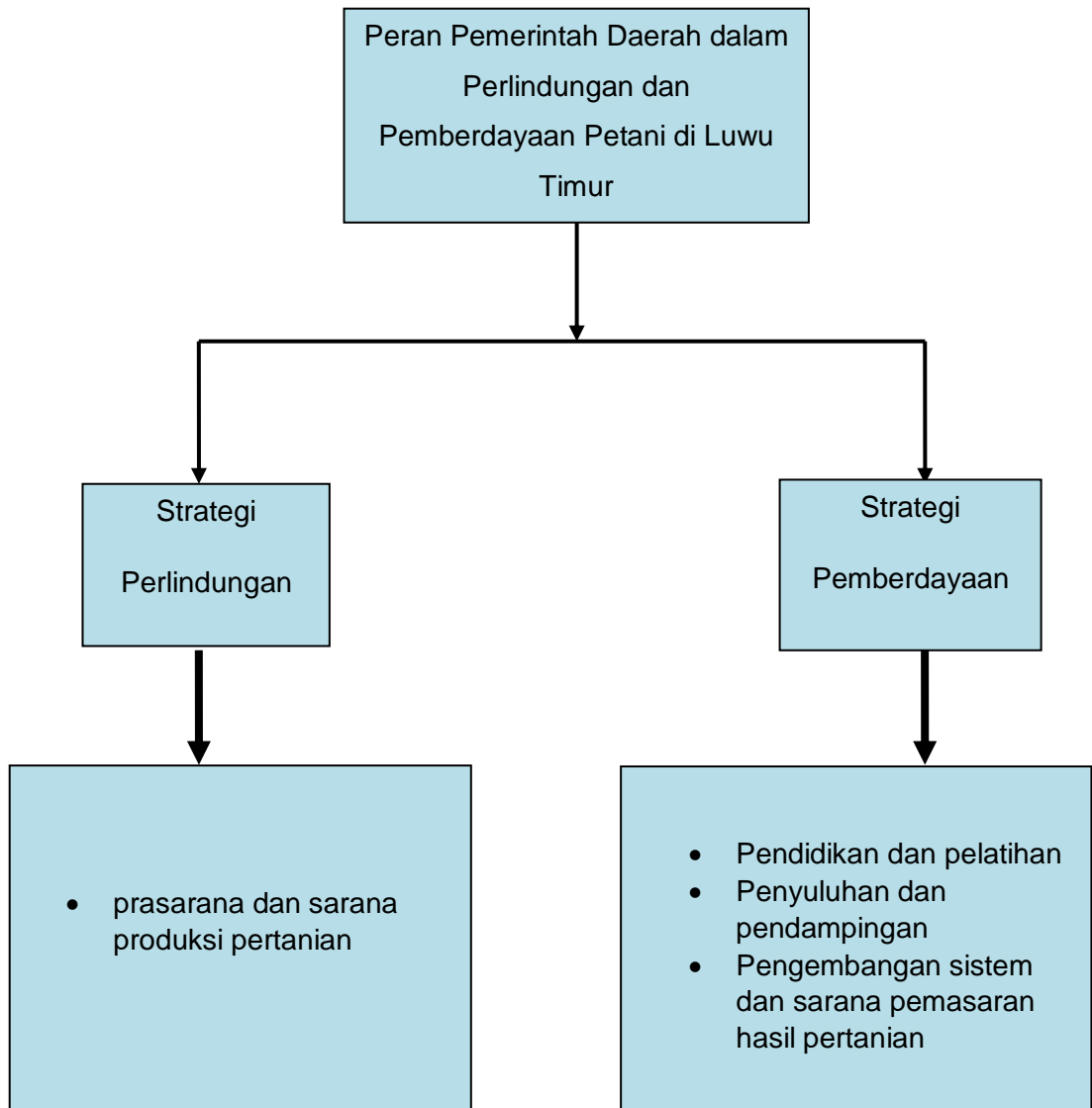
2.4. Kerangka konseptual

Belum mantapnya peningkatan kualitas pertanian memiliki dampak yang tinggi terhadap kegiatan pertanian yang akhirnya membuat pertanian semakin menurun. Permasalahan dalam bidang pertanian di Luwu Timur menyangkut pemberdayaan dan perlindungan petani yang meliputi kurangnya tingkat SDM petani sehingga belum mampu mengelola dengan baik lahan dan hasil pertaniannya, dunia pasar yang memberikan penawaran yang rendah sehingga mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kegiatan pertanian semakin menurun dan belum mantapnya sistem pelayanan penyuluhan pertanian terhadap kegiatan usaha tani.

Dalam meningkatkan kualitas pertanian tentunya diikuti oleh penyelenggara pertanian yang baik terutama dalam hal perlindungan dan pemberdayaan pertanian.

Berdasarkan hal di atas penulis ingin melihat bagaimana pemerintah daerah melaksanakan peran dan strateginya dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dan dalam hal tersebut peneliti memfokuskan pada dua aspek yaitu strategi perlindungan dan pemberdayaan, selanjutnya untuk menjalankan perannya dalam strategi perlindungan dan pemberdayaan ada hal yang mempengaruhi terlaksananya perlindungan dan pemberdayaan tersebut

Gambar 1. Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan penelitian dipengaruhi oleh banyaknya jenis variabel.

3.1. .Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan dan perlindungan petani di luwu timur ” maka penelitian ini akan dilakukan di Dinas pertanian di luwu timur .

3.2. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang merujuk pada “cara-cara” mempelajari aspek kualitatif dari kehidupan sosial yang mencakup beragam dimensi sosial dari tindakan dan keadaan, hingga proses dan peristiwa, sebagaimana dimengerti berdasarkan konstruksi dan makna yang diorganisasikan oleh dan melalui praktik-praktik sosial. metode penelitian kualitatif tidak hanya menuntun untuk mengumpulkan data, melainkan juga menuntun terhadap bagaimana data hendak dianalisis,

metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji ihwal tertentu secara mendalam dan rinci.,metode ini menghasilkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. hal ini meningkatkan pemahamanterhadap kasus-kasus dan disituasi itu, namun juga menngurangi kemungkinan generalisasi,dan dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen.,validitas dalam metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan orang yang melakukan kerja lapangan.

3.3. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pengambilan dilakukan secara purposive sampel yang dianggap representasi

- a.) Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur
- b.) Sekertaris Dinas Pertanian Luwu Timur
- c.) Kepala bidang Penyuluhan Pertanian Luwu Timur
- e.) Petani di kabupaten Luwu Timur

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap fakta mengenai tema permasalahan yaitu melalui

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari informan yang telah

dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer diperoleh melalui proses interview atau wawancara secara mendalam mengenai penelitian yang dimaksud.

2. Data Skunder, Adapun data skunder diperoleh melalui studi Pustaka, yaitu sumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. ditambahkan penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet. dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar interview yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Validitas dan reabilitas data kualitatif banyak bergantung pada keterampilan metodologis, kepekaan, dan integritas penelitian. observasi yang sistematis dan ketat melibatkan jauh lebih dari hanya berada di suatu tempat dan melibatkan jauh lebih dari hanya mengajukan pertanyaan. analisis ini menuntun jauh lebih banyak dari hanya membaca apa yang ada.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

1. Studi pustaka/dokumentasi

Studi pustaka adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi data penelitian yang berkaitan dengan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengembangan SDM Aparatur. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang

beragam teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian. Dengan menggunakan teknik ini dapat diketahui pola tingkah laku subjek. Sehingga data dapat diperoleh secara langsung, tanpa mengajukan pertanyaan.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui pengajuan sejumlah pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada informan untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi data online

Dokumentasi data online yaitu sama halnya dengan studi kepustakaan, yang membedakan yaitu media tempat pengambilan data atau informasi. Teknik ini menggunakan teknik online yaitu fasilitas internet.

3.6. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pemberdayaan

A.) Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

B.) Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pendampingan,

2. pemerintah daerah di luwu timur yang di maksud adalah dinas pertanian luwu timur

3. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pertanian dilihat pada aspek:

A.) perlindungan

1. Prasarana dan sarana produksi pertanian;

B.) pemberdayaan

1.pendidikan dan pelatihan;

2.penyuluhan dan pendampingan;

3.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.